BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 sebagai instrumen penegakan hukum berfungsi daya paksa agar masyarakat patuh untuk mengikuti program vaksinasi dan takut dengan ancaman apabila tidak mengikutinya serta sebagai langkah terakhir yang akan ditempuh jika terjadi penolakan vaksinasi. Program vaksinasi dengan ancaman sanksi administrasi di peruntukan untuk menghindari permasalahan dari efek sosial *free rider* dan *tragedy of the commons*. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, dengan mendapatkan vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus Corona.
2. Sanksi dengan pembatasan Hak Asasi Manusia memang dibutuhkan dalam hal kesehatan publik tetapi kedudukan sanksi administrasi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental, sanksi administrasi yang

dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) Perpres 14 Tahun 2021 hanya diperbolehkan untuk perlindungan kesehatan publik sehingga hak atas individu dapat dibatasi untuk perlindungan orang lain atau publik.

B. Saran

1. Penggunaan sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum hendaknya digunakan seminimal mungkin dan sebisa mungkin menggunakan metode persuasif seperti sosialisasi, penyuluhan dan lain-lainnya, pendekatan dengan menggunakan sanksi administrasi ini berisiko menimbulkan reaksi balik yang dapat mengakibatkan semakin banyaknya penolakan terhadap program vaksinasi yang sedang bergulir.
2. Pembatasan Hak Asasi Manusia pada Perpres 14 Tahun 2021 hanya diatur melalui Peraturan Presiden yang bukan aturan yang setingkat dengan Undang-undang, agar dapat memastikan kepentingan masyarakat secara lebih luas maka akan lebih baik jika sanksi administrasi diatur melalui Undang-Undang atau melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.